

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

DP3AP2KB KOTA CIMAHI
PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AP2KB Kota Cimahi ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum memberikan gambaran keberhasilan program secara menyeluruh di semua bidang, namun hanya pada sub bidang yang menjadi skala prioritas. Namun demikian, intisari dari laporan kinerja ini mutlak menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dimasa mendatang.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dengan sungguh – sungguh, sesuai tugas dan fungsinya di bidang urusan pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.

Mudah – mudahan dengan integritas yang kita miliki dalam menjaga eksistensi akuntabilitas DP3AP2KB Kota Cimahi ini, akan tetap menjadi elemen positif reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik.

Semoga Allah senantiasa memberikan Hidayah dan Inayah - Nya bagi kita semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Cimahi, Januari 2023

KEPALA DP3AP2KB KOTA CIMAHI,



dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina Tk I
NIP. 19680101 199803 2009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi (DP3AP2KB) merupakan Laporan capaian Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022. LKIP tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2018-2022 dan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati antar Kepala DP3AP2KB dengan Plt.Walikota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AP2KB Kota Cimahi tahun 2022 sangat berbeda dengan LKIP tahun sebelumnya, selain terdapat beberapa indikator program yang berbeda karena harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Selain itu juga program dan kegiatan serta target kinerja harus diselaraskan dengan perubahan RKPD (2018-2022) sehingga diharapkan nilai capaian LKIP akan bertambah dan lebih baik sesuai yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kota Cimahi juga mengalami perubahan seiring dengan berubahnya nomenklatur organisasi dimana urusan pemberdayaan masyarakat menjadi urusan yang diampu juga oleh DP3AP2KB Kota Cimahi. Secara keseluruhan terdapat tujuh Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh DP3AP2KB yaitu Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Politik, Persentase Capaian Kota Layak Anak, CPR (Contraceptive Prevalence Rate) , Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, Nilai Evaluasi RB.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 19 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 8 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 % , 6 Indikator kinerja program melebihi target yang ditetapkan, yang tidak tercapai target hanya 3 (tiga) indikator saja .

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 dianggarkan biaya sebesar Rp. 17.705.598.242- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 13.852.285.742,-- atau sebesar 78,24% dan terdapat efesiensi dan adanya anggaran yang tidak terserap karena keterlambatan juknis terkait pelaksanaan satu kegiatan sehingga berakibat tidak maksimalnya penyerapan anggaran sebesar 21,76 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 UMUM.....	1
1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	2
1.2.1 Uraian Tugas	3
BAB II	5
PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	5
2.2 PERJANJIAN KINERJA	6
BAB III	9
AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1.1 CAPAIAN KINERJA	9
1. Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	9
2. Realisasi Tahun 2021 Dengan Target RPJMD Perubahan.....	20
3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	21
4. Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya.....	23
5. Prestasi, Penghargaan Dan Inovasi Kota Cimahi Tahun 2019	36
BAB IV	27
PENUTUP.....	27
4.1 Penutup.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AKBP2A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi merupakan organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja DP3AP2KB merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Cimahi Tahun 2018 – 2022 serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan berdasarkan Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

RPJMD merupakan bahan acuan untuk menentukan Rencana Strategis Kota yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh semua OPD. Terdapat beberapa perubahan Rencana Strategis Kota dan juga terdapat beberapa IKU Walikota yang secara otomatis akan berpengaruh juga terhadap perubahan IKU Kepala OPD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AKBP2A Dinas dalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi mengampu beberapa Misi Walikota dan mempunyai empat Indikator Kinerja Utama. Pada saat dilakukan perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra maka dilakukan juga beberapa perubahan indikator pendukung capaian IKU dan dilakukan penyesuaian target capaiannya. Hal ini dilakukan setelah melihat capaian program dan kegiatan terhadap IKU tersebut, yaitu IKU CPR (Contraceptive Prevalence Rate), Persentase Indikator Penilaian APE yang dipenuhi, Persentase Indikator Kota Layak Anak Yang Dipenuhi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi telah melakukan perencanaan program dan kegiatan di awal tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas kemudian mengimplementasikannya guna dicapainya kemajuan-kemajuan dalam penanganan masalah pembangunan Kota Cimahi, khususnya bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2022 telah selaras dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan *good and clean government*, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.

Maksud Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi adalah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DP3AP2KB Kota Cimahi yang sudah ditetapkan di awal tahun 2022. Sedangkan tujuan dalam Penyusunan LKIP DP3AP2KB Kota Cimahi ini adalah memberikan gambaran tentang pencapaian target dan sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2022.

1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali kota tersebut DP3AP2KB Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

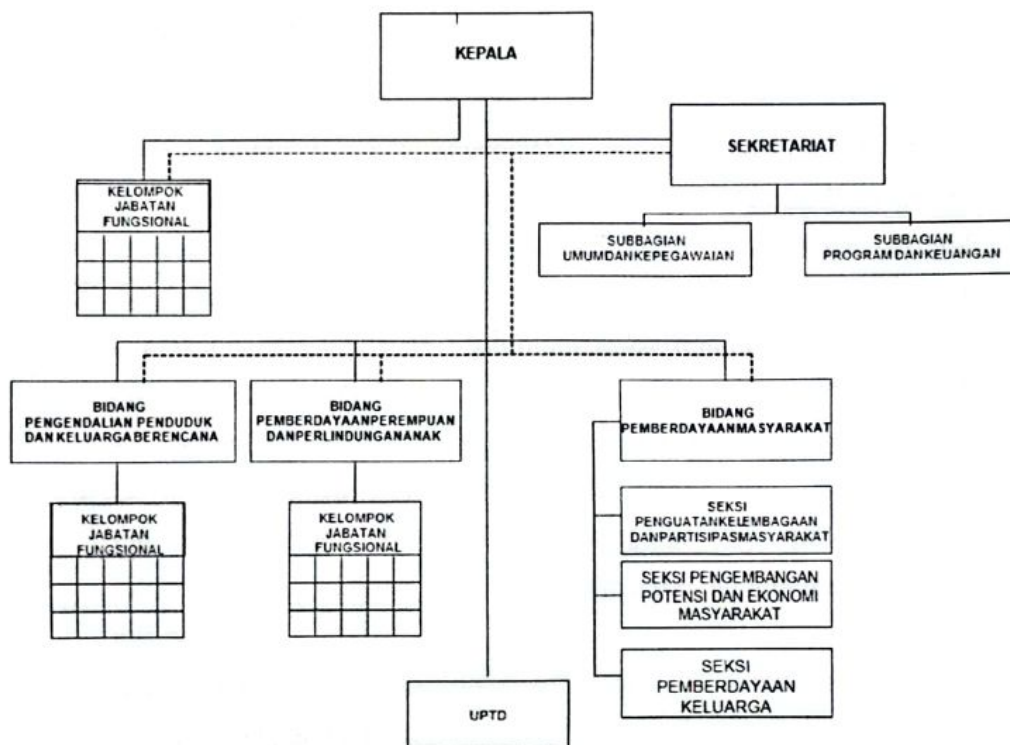
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk,

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :



1.2.1 Uraian Tugas

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
 - 1) KB MKJP harus lebih digalakkan
 - 2) PIK Remaja yang sudah terbentuk harus tetap dibina pemahaman, sikap & perilakunya tentang kesehatan & hak-hak reproduksi

- 3) Banyaknya program dan kegiatan dari Pusat (seperti Lomba lomba) yang memerlukan Biaya yang cukup tinggi dalam seremonialnya, akibatnya berkurang sumber daya baik SDM maupun anggaran untuk menggarap pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga.
- b. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- 1) Pembangunan yang responsif gender masih belum optimal
 - 2) Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah cukup baik, hanya tetap harus ditingkatkan kualitasnya
 - 3) Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 4) Belum terbentuknya UPTD P2TP2A sebagaimana diamanatkan oleh Permen PPPA nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi P2TP2A kepada masyarakat.
- c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Adapun isu-isu strategis terkait masalah Pemberdayaan Masyarakat meliputi:.
1. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral.
 2. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
 3. Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan Crowdfunding untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet.
 4. Belum maksimalnya pengelolaan profil kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM). RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2018, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota juga harus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kurun waktu tahun 2017 – 2022 merupakan pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut seluruh upaya pembangunan diarahkan pada *pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar*. Oleh karena itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 pun mengacu pada hal tersebut.

Dengan telah ditetapkan RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2018-2022 dan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi dalam SK Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi Nomor : 050/ 30-SK.Set /DP3AP2KB/2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	CPR
MISI V : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN			
2	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase Indikator penilaian APE
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
3	Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Persentase Indikator Penilaian KLA yang dipenuhi

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikator programnya. Pada tahun 2022 target-target setiap indikator sasaran telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi umum bagi unit kerja	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %
Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100%

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	BB
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	33%
	Jumlah keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100 KK
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 %
Terpenuhinya penyediaan data gender dan anak	Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	90 %
Meningkatnya pengendalian penduduk	Unmet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	9%
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80%
Terkendalinya jumlah rata - rata anak per keluarga	Rata rata jumlah anak per keluarga	2,1 Anak
Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) <20 tahun	0.65%
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	12,39 %
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	14,46 %
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	11,66 %
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,38%
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	1,26 %
Terpenuhinya Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang terbina	100 %
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan aktif	100 %

Berikut kami sampaikan rencana program dan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2022.

Tabel 1.4
Program yang Mendukung Perjanjian Kinerja beserta Anggaran

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.114.473.742
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 962.865.000
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 131.170.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 60.405.000
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 210.438.700
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 489.469.400
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 3.417.558.900
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 3.420.929.700
9	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 45.790.900
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 852.496.900
	JUMLAH	Rp 17.705.598.242

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.1 CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I Laporan ini, bahwa setiap kegiatan dan hasil – hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara/ instansi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggung jawaban, maka setiap kegiatan unit satuan kerja harus dapat diukur keberhasilannya. Tolak ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan unit kerja. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja DP3AP2KBA Kota Cimahi, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada tahun 2022, telah ditetapkan target pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja pada bab sebelumnya. Berikut kami sajikan data pencapaian target kinerja DP3AP2KBA Kota Cimahi Tahun 2022 :

Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Untuk Capaian Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022 dapat dilihat dari table yang sudah kami susun sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja DP3AP2KBA Kota Cimahi Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		
Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi umum bagi unit kerja	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Admiistrasi umum	100 %	100%	100%
Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100%	100%	100%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	BB	NA	NA
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	33%	60,65 %	183 %
	Jumlah keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100 KK	100 KK	100%

Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 %	100%	100%
Terpenuhinya penyediaan data gender dan anak	Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	90 %	97 %	107 %
Meningkatnya pengendalian penduduk	Unmet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	9%	13,86%	65 %
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80%	78,41	98 %
Terkendalinya jumlah rata-rata anak per keluarga	Rata rata jumlah anak per keluarga	2,3 Anak	2,3	100%
Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur)<20 tahun	0.65%	0,74%	88%
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	12,39 %	58,07%	468 %
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	14,46 %	36,17%	250%
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	11,66 %	57,37%	402%
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,38%	0,59%	155%
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	1,26 %	8,64%	685%
Terpenuhinya Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang terbina	100 %	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan aktif	100 %	100%	100%

1. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja 2022

Sasaran 2.1.

Terfasilitasnya Pelayanan Administrasi umum bagi unit kerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk indikator kinerja pertama yakni persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum indikator ini tercapai realisasi kinerja 100 %. Indikator ini mendukung tersedianya pelayanan umum meliputi pelayanan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan dan kelancaran administrasi di semua unit kerja yang ada di DP3AP2KBA meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Indikator ini dapat tercapai 100 % karena merupakan kegiatan rutin untuk memfasilitasi kebutuhan organisasi serta tidak ada kendala yang dihadapi .

Sasaran 2.2.

Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang kedua adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi. Indikator ini merupakan indikator yang baru yang menjadi sasarannya adalah meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dengan harapan untuk lebih meningkatkan profesionalisme pegawai yang ada di

DP3AP2KBA. Capaian Kinerja 100% Ketersediaan ASN yang sesuai dengan kompetensi sangatlah terbatas, namun melalui segala bentuk penambahan wawasan melalui bintek ataupun pelatihan diharapkan mampu mengimbangi kesesuaian, karenanya berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kompetensi ASN agar sesuai dengan harapan, sedangkan untuk tahun tahun sebelumnya indikatornya berbeda hanya jumlah ASN yang terbina saja.

Sasaran 2.3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
Capaian Nilai LAKIP	BB	NA	NA						

Indikator kinerja untuk sasaran strategis berikutnya Capaian Nilai LAKIP, sebagai OPD baru yang baru terpisah dari DINSOSP2KBP3A , jadi untuk merencanakan target dan capaian kinerjanya bisa diambil dari historis realisasi kinerja dari organisasi induknya yaitu DP3AP2KB. Namun sampai laporan ini dibuat pihak terkait yang berwenang memberikan nilai LAKIP belum bisa mengeluarkan nilai tersebut. Namun secara keseluruhan capaian kinerja DP3AP2KB sudah cukup baik sehingga diharapkan target kinerja secara keseluruhan dapat tercapai.

Sasaran 2.4. Meningkatnya kemandirian akseptor KB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Rasio akseptor KB Mandiri	78,89%	78,89%	100 %	78,90%	79,13 %	100,29%	80 %	78,41%	98 %

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah meningkatnya rasio akseptor KB dari target 80 % tercapai 78,41 % tercapai kinerja 98%. Indikator ini tidak memenuhi capaian kinerja maksimal karena banyaknya factor yang menjadi penyebabnya, diantaranya adalah banyaknya pasangan usia subur yang baru

menikah sehingga mereka tidak ber KB dikarenakan tidak ingin menunda kehamilan dan meningkatnya angka DO. Hal ini bukan berarti kinerja bidang KB menurun akan tetapi banyak hal yang diluar kewenangan dan tanggung jawab DP3AP2KB yang tidak bias dihindari. Akan tetapi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang ketercapaian Indicator ini telah dilaksanakan dengan maksimal.

Sasaran 2.5. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Rasio akseptor KB mandiri	80%	80 %	80 %	80%	80%	100%	80%	78,41%	98%

Indikator kinerja Rasio Akseptor KB Mandiri untuk tahun ini tidak memenuhi capaian target kinerja salah satu penyebabnya adalah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB banyak yang memanfaatkan pelayanan KB Gratis yang diberikan oleh BKKBN yang menaikan target sasaran, selain itu dimungkinkan adanya factor ekonomi akibat imbas dari covid 19 yang dampaknya masih terasa dimasyarakt sehingga masyarakat mencari yang tidak mengeluarkan biaya untuk pemasangan alat kontrasepsi.

Sasaran 2.6. Terkendalinya jumlah anak dalam setiap keluarga

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Rata rata jumlah anak per keluarga	-	-	-	2,3	2,3	100%	2,3	2,3	100 %

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah rata rata jumlah anak per keluarga yang tercapai 100%. Ini menunjukan bahwa pasangan usia subur yang ada di Kota Cimahi rata rata mempunyai anak antara 2 sampai 3 orang, hal tersebut menunjukan semakin sadarnya masyarakat untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga mereka demi mewujudkan keluarga sejahtera. Petugas lini lapangan bisa berbangga dengan capaian indicator ini.

Sasaran 2.7 Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi	-	-	-	9,1	9,6	94,79 %	9 %	13,86 %	65%

Indikator Unmeet Need capaian kinerja tahun 2022 hanya mencapai 65% sama halnya dengan capaian indicator yang lain yang tidak memenuhi target capaian kinerja disebabkan adanya pergantian system di BKKBN Pusat semula pelaporannya menggunakan data Udgregad (angka) saja, tetapi berdasarkan hasil pelaporan yang baru yang harus mencantumkan by name by adres yang memuat keterangan yang lebih rinci anatara lain tentang data diri, demografi, data kepesertaan ber KB dan data pembangunan keluarga (Ketahanan Keluarga, Kemiskinan Ekstrim/Kepemilikan asset, Keluarga beresiko stunting) terkait pasangan usia subur termaksud, sehingga jumlah capaian data menurun hampir disemua indicator KB dan ini tidak saja diKota Cimahi akan tetapi berdampak pada capaian indicator KB secara nasional.

Capaian ini berarti bukan berarti pelayanan KB tidak maksimal hanya saja perlu diketahui bahwa penduduk Kota Cimahi mobilitasnya sangat tinggi laju yang datang dan yang keluar dari Kota Cimahi sangatlah tinggi terlebih di daerah daerah industri.

Sasaran 2.8 Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur)<20 tahun	-	-	-	0,65%	0,37%	175%	0,65%	0, 74 %	88 %

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah Cakupan Pasangan Usia subur < 20 Tahun dengan realisasi sebesar 88 % walaupun capaian indicator ini tidak

maksimal bukan berarti kinerja Bidang KB DP3AP2KBA menurun tetapi karena adanya transisi pemakaina system yang baru dalam pelaporan dari BKKBN Pusat.

Sasaran 2.9
cakupan kepesertaan keluarga dalm BKB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	-	-	-	12,39%	46,49%	375%	12,39%	58,07%	468 %

Indikator kinerja cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB merupakan indikator baru yang harus dievaluasi dan hasil kinerja diperoleh sebesar 468 % dari target 12,39% dengan capaian kinerja sebesar 58,07% angka ini diperoleh dari hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan di tahun 2022. Ini membuktikan bahwa kepesertaan keluarga mengikuti Bina Kelurga Balita naik signifikan fenomena ini didukung juga oleh senangnya masyarakat terutama ibu ibu untuk berkumpul dan bersosialisasi , pengetahuan ibu ibu muda sangat meningkat tetang tata cara pola asuh anak, keingintahuan mereka didukung juga dengan kemudahan mengakses berbagai informasi dari medsos terkait dengan pola asuh anak sehingga ketercapaian BKB sangat tinggi.

Sasaran 2.10
cakupan kepesertaan keluarga dalm BKR

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	-	-	-	14,46%	26,95 %	186%	14,46%	36,17 %	250 %

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKR atau Bina Keluarga Remaja dengan target sebesar 14,46 % tercapai sebesar 36,17% jadi capaian kinerja sebesar 250% capain ini menunjukan berhasilnya KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi.

Sasaran 2.11
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm BKL

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	-	-	-	11,66%	29,72%	254%	11,66%	57,37% %	402 %

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKL atau Bina Keluarga Lansia dengan target sebesar 11,66 % tercapai sebesar 57,37% capaian kinerja sebesar 402% capain ini menunjukan berhasilnya KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) dengan sasaran usia lanjut usia yang dilakukan oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi.

Sasaran 2.12
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm UPPKS

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	-	-	-	0,37%	2,17%	586%	0,38 %	0,59 %	155 %

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam UPPKS sangatlah tinggi dari target 0,38% tercapai 0,59% sehingga capaian kinerja mencapai 155%, ketercapain indikator ini didukung oleh banyak faktor terlebih dimasa pandemic setiap keluarga akan berusaha untuk bertahan hidup dan menaikan pendapatan keluarga dengan berbagai cara tanpa harus keluar rumah (juala on line) peran media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta optimalnya pelaksanaan KIE kepada masyarakat.

Sasaran 2.13
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	-	-	-	1,25%	8,9%	712%	1,26 %	8,64 %	685 %

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam PIK R/M (Pusat Informasi Keluarga Remaja dan Mahasiswa) tercapai sangat bagus , dari target 1,26 bisa tercapai sebesar 8,64% jadi capaian kinerja sebesar 685% , sama halnya dengan tribina (BKR, BKB, dan BKL) kepesertaan keluarga dalam PIK dipengaruhi oleh berbagai hal, namun ini lebih menunjukkan kerja keras dari petugas lini lapangan dalam menyebarkan informasi , sosialisasi dan edukasi kesemua sasaran berhasil dengan baik serta banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh para remaja dan mahasiswa akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh mendorong sebagian remaja mencari aktivitas lain seperti PIK R/M.

Sasaran 2.14
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	65 %	50 %	76,92 %	87%	89,82%	102%	90 %	97 %	107 %

Indikator Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar mempunyai target 90% , indikator ini hanya dihitung dari ketiga kebutuhan dasar anak yang harus dilayani yaitu kebutuhan pendidikan dasar (SD, SMP dan SMA) dengan hasil ketercapaian sebesar 97% , kebutuhan akan pelayanan imunisasi dasar dicapai sebesar 92,2% dan kebutuhan ketersediaan akta kelahiran dicapai dengan sebesar 98% sehingga ketercapaian kinerja indikator ini mencapai 107%. Dari ketiga pemenuhan kebutuhan dasar anak tersebut maka capaian kinerja mencapai 107 % , ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi senantiasa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Sasaran 2.15
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2022		
Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	-	-	-	33 %	59,2%	179 %	33%	60,65%	183 %

Indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ditargetkan sebesar 33% pada tahun 2022 tercapai sebesar 60,65 % dengan capaian kinerja sebesar 183 % hasil ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah ASN perempuan dibagi jumlah keseluruhan jumlah ASN yang ada di Pemkot Cimahi. Ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan khususnya di Pemkot Cimahi cukup tinggi, perempuan bisa meyakinkan semua pihak bahwa dia mampu untuk mengambil peran pada pemerintahan.

Sasaran 2.16
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A ditargetkan 100% dan tercapai 100% artinya semua pengaduan yang diterima oleh P2TP2A Kota Cimahi selalu diselesaikan dan tertangani seluruhnya. Penanganan dan pelayanan yang diberikan tidak saja pada pendampingan psikologis, pendampingan psiko sosial akan tetapi sampai pada tahapan pendampingan hukum dan medis juga. Selama tahun 2022 terdapat 78 pengaduan kasus kekerasan meliputi kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 33 kasus dan 45 kasus kekerasan terhadap anak. Ke 78 kasus tersebut telah mendapatkan penanganan di P2TP2A sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Hal ini membuktikan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan kasus antara P2TP2A dan Bidang yang

menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik koordinasi internal dan eksternal.

Sasaran 2.17
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Indikator selanjutnya yang dievaluasi adalah persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, realisasi kinerja indikator ini tercapai 100% dari target 100% dengan asumsi bahwa data gender dan anak dipakai dalam menentukan perencanaan pembangunan dan pada tahun 2022 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB telah selesai menyusun data terpilah gender sehingga bisa dijadikan bahan referensi bagi perencanaan.

Sasaran 2.18
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
Persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	-	-	-	-	100 %	100 %	100%	100%	100%

Indikator selanjutnya yang dievaluasi adalah persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga, realisasi kinerja indikator ini tercapai 100% dari target 100%. Perlu kami informasikan bahwa Program dan kegiatan ini mempunyai sasaran 100 Keluarga binaan di Lokasi P2WKSS dengan harapan setelah mereka diberikan pelatihan keterampilan, ilmu pengetahuan dan wawasan dapat meningkatkan perekonomian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bagi mereka.

2. Realisasi Tahun 2022 Dengan Target RPJMD Perubahan

Indikator	Target RPJMD 2018-2022	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100 %	100 %	100%	100%
Capaian Nilai LAKIP	BB	BB	NA	100%
Rasio akseptor	79%		79,13 %	100,29%
Rasio akseptor KB mandiri	80%	80 %	78,41 %	98 %
Rata rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,3	2,3	100%
Unmeet need	9 %	9 %	13,86 %	65 %
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur)<20 tahun	0,64%	0,65%	0,74 %	88 %
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	12,39%	12,39%	58,07 %	468 %
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	14,46%	14,46%	36,17 %	250 %
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	11,66%	11,66%	57,37 %	402 %
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,38%	0,38%	0,59 %	155 %
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	1,26%	1,26%	8,64 %	685 %
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	90 %	90 %	97 %	107 %

Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	33%	33%	60,65 %	183 %
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100%	100%	100%	100%
Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%
Persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	100%	100%
Persentase Kelurahan yang terbina	100%	100 %	100 %	100 %
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan aktif	100%	100 %	100 %	100 %

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Keberhasilan program dan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja utama akan sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik itu sumber daya manusia, sumber dan anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya kemitraan.

Sumber Daya yang dimiliki oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi tahun 2022 meliputi :

- Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung keberlangsungan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan saat ini terdiri dari :

A S N : 33 Orang

THL APBD : 7 Orang

THL Propinsi : 1 Orang

Sumber Daya Anggaran dan pembiayaan

Sumber dana yang dimiliki selain dari APBD juga dana yang diperoleh dari DAK, Bantuan Gubernur (Tentatif) juga dana dari BAZNAS Kota Cimahi ataupun sumbangan perorangan (untuk kegiatan sosial)

- Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki meliputi : Gedung dan Kendaraan Operasional

Gedung terdiri dari 9 Bangunan terdiri dari :

- a. Gedung kantor DP3AP2KB
- b. Gedung Balai Penyuluh KB
- c. Gudang Alat Kontrasepsi
- d. Gedung Sekretariat P2TP2A
- e. Gudang Arsip

Untuk beberapa sarana yang dimiliki seperti Gedung Sekretariat P2TP2A, Gudang Arsip, statusnya masih sewa kepada pihak lain ini menunjukkan bahwa DP3AP2KBA akan senantiasa berupaya maksimal menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

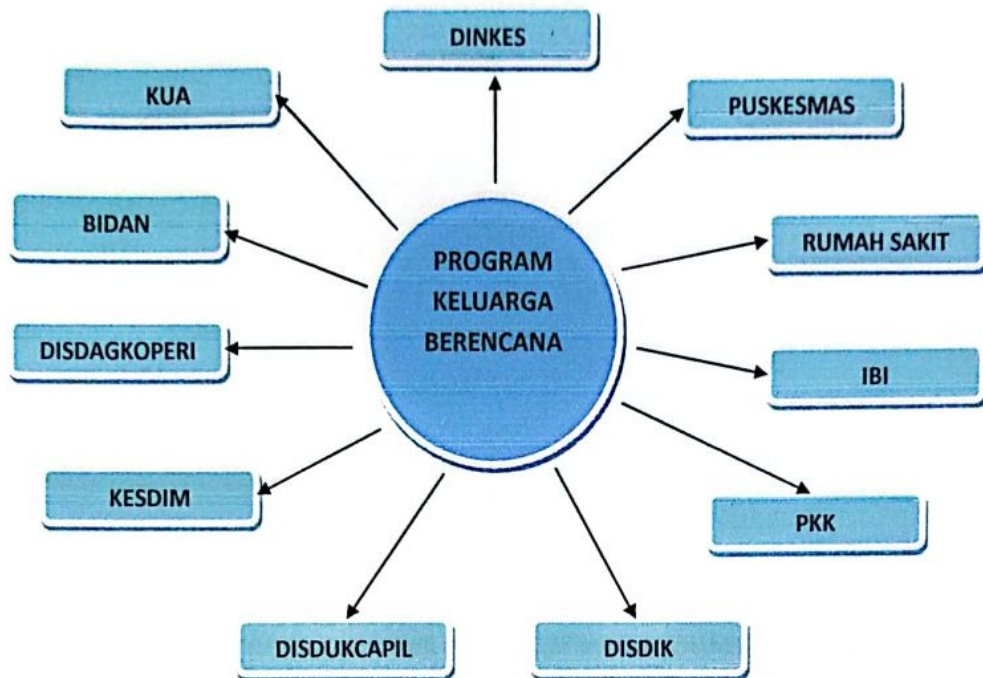
- Sarana transportasi (Kendaraan Operasional)

Sarana kendaraan operasional yang dimiliki oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi :

- Kendaraan Akseptor KB satu unit
- Kendaraan Mobil Perlindungan (MOLIN) satu unit
- Kendaraan /Mobil Penerangan (Mupen KB) satu unit
- Kendaraan Mobil BOX Untuk Distribusi Alkon satu unit
- Kendaraan Roda dua sebanyak 9 Unit

4. Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya

1) CROSS CUTTING PROGRAM KELUARGA BERENCANA



1) CROSS CUTTING PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



2) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN



3) CROSS CUTTING PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK



4) **CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR**



5) **CROSS CUTTING PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**



**6) CROSS CUTTING PENINGKATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**



5. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi DP3AP2KBA Tahun 2022

- Juara 1 Duta Genre Putera Tingkat Jawa Barat
- Juara harapan 1 Duta Genre Puteri Tingkat Propinsi Jawa Barat
- Juara 3 PIK R segmentasi Berkolaborasi Tingkat Prpropinsi Jawa Barat
- Juara BKR Tingkat Propinsi Jawa Barat
- Juara 2 Cultural Immersion Tingkat Propinsi Jawa Barat
- Juara Harapan 1 Lomba Posyandu Tk. Propinsi Jawa Barat
- Juara 2 gagah Bencana Tk. Propinsi Jawa Barat
- Juara 3 Lomba Kelurahan Tk. Propinsi Jawa Barat
- Juara 3 Lomba LBS Tk. Jawa Barat
- Juara 2 Lomba PHBS Tingkat Jawa Barat
- Juara Harapan 1 Lomba Tertib Administrasi 10 Program PKK
- Juara Harapan 2 Lomba IVA Test Tk. Propinsi Jawa Barat
- Juara Harapan 3 Lomba Gelar Pelangi Tk. Propinsi Jawa Barat.

BAB IV PENUTUP

4.1 Penutup

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP3AP2KBA Kota Cimahi Tahun 2022 ini, dapat Kami simpulkan bahwa DP3AP2KBA Kota Cimahi secara umum mempunyai 3 (tiga) Tujuan, 7 Sasaran Strategis, 7 Indikator Kinerja Utama dan 19 (dua puluh) indikator kinerja program.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 19 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 8 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 %, 7 indikator kinerja program berhasil melampaui target yang ditetapkan yakni indikator Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Persentase Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB, Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR, Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL, Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS, Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIKR/M, Terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai yaitu unmeet need (65%), Rasio Akseptor KB Mandiri (98%), Cakupan PUS (Pasangan Usia subur) dibawah 20 tahun (88%), sedangkan untuk indikator Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam BKB, (468%) , Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam BKR (250 %) Cakupan Kepesertaan Keluar dalam BKL (402 %) Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam UPPKS (155%) Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam PIK R atau M (685%) .

Pada Tahun 2022 terdapat peningkatan yang sangat besar dalam capaian target sasaran untuk indikator tribina, hal ini disebabkan oleh pembinaan yang secara rutin dilakukan oleh petugas lini lapangan (PLKB, TKB, IMP (Pos KB dan Sub PPKBD, juga besarnya komitmen dan kerja keras bidang KB khususnya dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Selain itu perencanaan didasarkan pada capaian tahun sebelumnya sehingga dianalisa bahwa penetapan target tidak terlalu jauh dengan capaian tahun sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi cukup banyak, selain keterbatasan anggaran dan dana juga keterbatasan Sumber Daya. Setelah berpisah dengan organisasi Induknya yaitu DP3AP2KB dan urusan sosial terpisah,

namun urusan lain yang harus dikelola adalah urusan pemberdayaan masyarakat sehingga secara beban kerja tidak terjadi perubahan, bahkan lebih banyak membutuhkan sumber daya manusia untuk dapat mengelola urusan tersebut, namun DP3AP2KB dengan segenap sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada akan tetap berusaha maksimal memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebagai tujuan demi memenuhi semua target Indikator Kinerja Utama yang pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat Kota Cimahi dapat hidup dengan baik dan nyaman , perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga terencana menuju Cimahi yang sejahtera dan bahagia.